



Peran Moderasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis SAP

Akmal Hidayat¹, Dinar², Riska Rahman³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Fajar, Makassar

Abstract

This study examines the effect of Government Accounting Standards (SAP) implementation on the quality of local government financial reports, moderated by the Local Government Financial Accounting System (SAKD). Utilizing primary data from 61 financial apparatus across 24 local government organizations in Enrekang Regency in 2026. Data were analyzed using Moderated Regression Analysis (MRA) with mean-centering to mitigate structural multicollinearity. The results revealed that SAP implementation does not significantly affect financial report quality. SAKD partially has a positive effect on reporting quality. However, SAKD interaction fails to moderate the relationship between SAP and report quality, confirming SAKD merely acts as an independent predictor. The implication dictates that technological sophistication cannot substitute for weaknesses in accounting conceptual competencies. Continuous human resource capacity building remains crucial.

Keywords: Accounting Standards, Financial System, Financial Report, Moderation, MRA.

Abstrak

Penelitian ini menguji pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dimoderasi oleh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Menggunakan data primer dari 61 aparatur keuangan pada 24 OPD Kabupaten Enrekang tahun 2026. Analisis data dilakukan dengan Moderated Regression Analysis (MRA) berbasis mean-centering untuk meminimalisasi multikolinearitas struktural. Hasil penelitian menunjukkan penerapan SAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. SAKD secara parsial memengaruhi kualitas pelaporan secara positif. Namun, interaksi SAKD gagal memoderasi hubungan penerapan SAP dan kualitas laporan, menegaskan SAKD hanya bertindak sebagai prediktor independen. Implikasinya, kecanggihan sistem tidak dapat mensubstitusi kelemahan kompetensi konseptual akuntansi. Pembangunan kapasitas sumber daya manusia secara berkesinambungan adalah krusial.

Kata Kunci: Standar Akuntansi, Sistem Keuangan, Laporan Keuangan, Moderasi, MRA.

Article info

Received (25/07/2026)

Revised (27/08/2026)

Accepted (30/07/2026)

Corresponding_ akmalhidayat@unifa.ac.id

DOI: 10.47354/mjo.v5i1

I. PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas sektor pemerintahan semakin hari semakin menguat, mendorong reformasi manajemen keuangan sektor publik yang komprehensif. Pada era modern ini, paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*) menempatkan akuntansi pemerintahan pada posisi sentral. Akuntansi pemerintahan bukan sekadar instrumen administratif, melainkan sebuah mekanisme esensial yang memproses transaksi keuangan terkait pengelolaan anggaran negara maupun daerah. Tujuan tertinggi dari implementasi akuntansi di sektor publik adalah untuk memfasilitasi terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui penyediaan informasi keuangan yang akurat, kredibel, dan komprehensif. Melalui serangkaian tahapan yang meliputi pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, hingga pelaporan, akuntansi sektor publik menghasilkan output berupa laporan keuangan yang menjadi dasar evaluasi, kontrol, dan perumusan kebijakan strategis oleh para pemangku kepentingan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas tinggi merupakan cerminan langsung dari keberhasilan entitas pemerintah dalam mengelola sumber daya ekonomi yang diamanatkan oleh rakyat. Sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebuah laporan keuangan dinyatakan berkualitas apabila memenuhi empat karakteristik kualitatif yang mendasar, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami. Karakteristik relevan mengimplikasikan bahwa informasi yang disajikan memiliki nilai prediktif dan konfirmatori yang memadai. Karakteristik andal mensyaratkan informasi bebas dari bias dan kesalahan material, serta disajikan secara jujur. Karakteristik dapat dibandingkan memungkinkan komparabilitas lintas periode dan entitas, sementara karakteristik mudah dipahami memastikan informasi dapat dicerna oleh para pengguna yang memiliki pengetahuan memadai. Keseluruhan karakteristik ini harus hadir secara akumulatif, bukan parsial, untuk menjamin integritas pelaporan keuangan.

Meskipun landasan normatif telah diatur sedemikian rupa, realitas di lapangan kerap menampilkan paradoks yang memprihatinkan. Peralihan rezim akuntansi pemerintah menuju basis akrual penuh, sebagaimana diwajibkan oleh regulasi, menuntut penyesuaian yang radikal. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual mewajibkan pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas berdasarkan substansi ekonomi (*substance over form*), bukan sekadar aliran kas kasat mata. Proses ini mengandalkan justifikasi profesional (*professional judgment*) yang rumit. Sayangnya, infrastruktur regulasi ini sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia. Ketidakmampuan atau rendahnya literasi konseptual aparatur di daerah dalam menerjemahkan prinsip-prinsip SAP menjadi sumber utama menurunnya kualitas pelaporan, yang kerap kali diakhiri dengan opini audit yang tidak memuaskan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Fenomena inkonsistensi pelaporan keuangan ini terekam jelas pada dinamika tata kelola di Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, LKPD Kabupaten Enrekang mencatat sejarah fluktuasi opini yang mengindikasikan kerapuhan sistemik. Pada tahun anggaran 2014, Kabupaten Enrekang masih mampu mengamankan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun, pada tahun 2015, situasi memburuk drastis dengan jatuhnya opini menjadi Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer). Anjloknya kualitas ini disinyalir kuat merupakan akumulasi dari kelemahan mendasar dalam implementasi SAP, di mana banyak pos aset dan transaksi operasional yang kehilangan jejak audit atau gagal dijelaskan secara standar. Meskipun pemerintah daerah berhasil bangkit dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2018 dan 2019, pencapaian WTP ini bukanlah jaminan terbebasnya sistem dari kelemahan. Hasil audit pasca-WTP menunjukkan masih adanya kelemahan administratif, pengelolaan aset yang tumpang tindih, serta pencatatan yang belum sepenuhnya sinkron dengan pedoman standar akrual, mengisyaratkan perlunya intervensi yang berkelanjutan.

Untuk menjembatani jurang kompetensi ini, pemanfaatan teknologi informasi diwujudkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sebagaimana yang digariskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013, SAKD adalah tulang punggung operasional berupa serangkaian prosedur sistematis yang mencakup penyelenggara, peralatan, dan entitas pendukung lainnya untuk mengeksekusi fungsi akuntansi. Sistem yang terkomputerisasi secara teoritis tidak hanya meningkatkan akselerasi pemrosesan data (*data processing speed*), tetapi juga membatasi ruang gerak penyimpangan (*human error*) melalui validasi otomatis. Penjurnalan berganda (*double-entry*), pembukuan buku besar, hingga kompilasi neraca dapat dilakukan dengan akurasi matematis yang absolut. Oleh karena itu, SAKD dianggap sebagai solusi mekanis terbaik dalam memitigasi defisiensi pemahaman akuntansi aparatur daerah.

Sejumlah literatur terdahulu telah berupaya memetakan variabel-variabel penentu kualitas laporan keuangan sektor publik. Penelitian Triwardana (2017) serta Suprihatin dan Ananthy (2019) menyimpulkan bahwa pemahaman dan implementasi SAP berkorelasi positif dan signifikan terhadap peningkatan mutu LKPD. Lebih spesifik pada aspek teknologi, Syawalina dan Rosmeiwati (2019) mengonfirmasi bahwa operasionalisasi sistem informasi akuntansi daerah memainkan peran prediktor yang solid dalam menghasilkan pelaporan yang andal. Namun demikian, penelaahan secara mendalam terhadap peta literatur ini menyingkap sebuah kesenjangan penelitian (*research gap*). Kebanyakan studi memposisikan pemahaman regulasi (SAP) dan perangkat sistem (SAKD) sebagai dua variabel independen yang berjalan linier tanpa interaksi. Terdapat kevakuman diskursus mengenai potensi saling menguatkan (atau melemahkan) di antara kedua entitas tersebut.

Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan mengonseptualisasikan ulang posisi SAKD. Kajian ini mengajukan premis bahwa SAKD memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai variabel pemoderasi (moderating variable). Argumentasinya berpijak pada asumsi bahwa sistem informasi yang canggih (SAKD) dapat menjadi jaring pengaman (safety net) yang mengkompensasi atau mengamplifikasi efek penerapan SAP di tengah varians pemahaman SDM. Ketika pemahaman aparatur terhadap standar akrual masih rapuh, sistem yang rigid dan otomatis diharapkan dapat menyaring kesalahan klasifikasi transaksi, sehingga penerapan SAP yang tidak sempurna tetap bermuara pada laporan yang berkualitas. Sebaliknya, interaksi ini akan menguji apakah sistem (SAKD) memang memiliki kemampuan transformatif, atautkah hanya sekadar kalkulator tanpa otak konseptual apabila SDM-nya gagal memahami substansi SAP.

Berdasarkan fenomena empiris dan bangunan argumentasi teoritis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Enrekang. Selain itu, penelitian ini secara sentral bertujuan untuk mengeksplorasi dan membuktikan secara statistik peran Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dalam memoderasi hubungan antara penerapan SAP dan Kualitas LKPD. Pengujian yang dilakukan melalui pendekatan Moderated Regression Analysis (MRA) ini diekspektasikan mampu menghadirkan kebaruan akademis (novelty) dengan menempatkan SAKD bukan sekadar sebagai alat kerja pasif, melainkan sebagai elemen interaktif yang krusial dalam arsitektur pelaporan keuangan sektor publik di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory) dan Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Dalam konteks akuntansi sektor publik, kerangka berpikir Teori Keagenan (Agency Theory) yang diinisiasi oleh Jensen dan Meckling memberikan landasan fundamental untuk memahami relasi antara publik (prinsipal) dan pemerintah (agen). Pemerintah, sebagai agen yang diberi mandat, mengelola sumber daya finansial publik. Asimetri informasi dan konflik kepentingan inheren dalam hubungan ini, sehingga laporan keuangan yang disusun berlandaskan standar akuntansi (SAP) berfungsi sebagai instrumen monitoring untuk mengurangi biaya keagenan (agency cost). Di sisi lain, Teori Kepatuhan menjelaskan motivasi perilaku aparatur dalam menaati regulasi (SAP) dan prosedur (SAKD). Kepatuhan yang didorong oleh komitmen internal terhadap transparansi akan menghasilkan output (laporan keuangan) yang jauh lebih substansial dibandingkan dengan kepatuhan yang sekadar menghindari sanksi administratif.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang memiliki kekuatan yurisdiksi, ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. SAP Berbasis Akrual mewajibkan entitas pemerintahan untuk mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas berdasarkan realitas ekonomi transaksi, tidak lagi terikat semata-mata pada pergerakan arus kas. Penerapan SAP ini diejawantahkan melalui Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 hingga PSAP 12, yang mencakup penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Konsistensi aparatur dalam mematuhi seluruh panduan PSAP tersebut secara teoretis menjamin komprehensivitas dan integritas laporan keuangan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

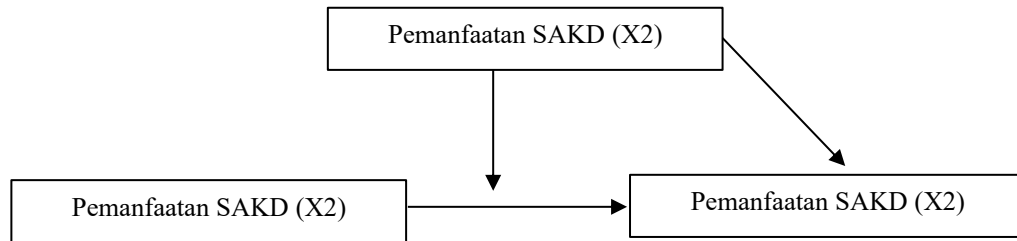
SAKD adalah instrumen teknologis dan prosedural yang mengawal implementasi SAP di lapangan. Merujuk pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, SAKD adalah serangkaian sistem yang terpadu yang memfasilitasi proses analisis transaksi, penjurnalan, posting buku besar, hingga pencetakan neraca saldo dan laporan keuangan. SAKD terdiri atas berbagai sub-sistem, termasuk sistem akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, aset tetap, dan akuntansi selain kas. Otomatisasi melalui SAKD dirancang untuk meminimalisasi redudansi pekerjaan (clerical error), meningkatkan akurasi aritmatika, serta mempercepat waktu pelaporan. Dalam kajian ini, SAKD ditinjau kapasitasnya sebagai variabel pemoderasi, yakni mengevaluasi kemampuannya dalam mengintervensi atau memodifikasi kekuatan hubungan antara pemahaman SAP dengan kualitas akhir LKPD.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Kualitas LKPD adalah tolok ukur utama kinerja akuntabilitas keuangan daerah. Karakteristik kualitatif LKPD yang ideal melingkupi relevansi (memiliki nilai umpan balik dan prediktif), keandalan (representasi tepat, dapat diverifikasi, netralitas), dapat dibandingkan (konsistensi kebijakan dan perbandingan antar entitas/periode), serta dapat dipahami (terminologi dan format yang logis). Laporan yang bermutu memastikan bahwa para pemangku kepentingan (stakeholders), seperti legislatif, investor publik, badan pengawas (BPK), dan masyarakat luas, tidak tersesat dalam pengambilan keputusan strategis.

Kerangka Konseptual

Berikut kerangka konseptual pada penelitian ini



Gambar 1. Kerangka Konseptual

III. METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini mengadopsi pendekatan kausal-asosiatif dengan metode kuantitatif. Penelitian kausal-asosiatif bertujuan untuk mengungkap hubungan sebab-akibat antar variabel, serta mendeteksi keberadaan efek moderasi yang kompleks. Populasi yang dituju adalah seluruh staf atau aparatur bagian keuangan yang bersinggungan secara operasional dengan penyusunan Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah yurisdiksi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Guna memastikan akurasi dan relevansi data dengan substansi akuntansi sektor publik, teknik penarikan sampel yang diterapkan adalah purposive sampling. Kriteria inklusi yang ditetapkan mengharuskan responden menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD, Bendahara Pengeluaran, atau Staf Sub-Bagian Keuangan/Akuntansi. Melalui penyaringan ini, diperoleh sampel sebanyak 61 responden dari 24 instansi OPD yang tersebar di Kabupaten Enrekang.

Pengumpulan data primer difasilitasi melalui penyebaran kuesioner terstruktur yang mengoperasionalkan setiap variabel ke dalam pernyataan berskala Likert 5 poin (Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju). Variabel independen Penerapan SAP (X1) diukur dengan 28 butir pernyataan yang mengafirmasi pemahaman dan implementasi 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Variabel pemoderasi, Pemanfaatan SAKD (X2), dinilai melalui 26 butir pernyataan yang berfokus pada kesesuaian sistem dengan standar, disiplin prosedur pencatatan transaksi, dan kapabilitas ekstraksi pelaporan periodik. Variabel dependen, Kualitas Laporan Keuangan (Y), diukur melalui 11 butir pernyataan yang merefleksikan pemenuhan karakteristik relevan, andal, komparatif, dan komprehensif (dapat dipahami). Kredibilitas instrumen diuji secara rigor melalui analisis Validitas (Pearson Product-Moment) dan Reliabilitas (Cronbach's Alpha). Syarat kecukupan model ekonometrika dipastikan melalui serangkaian uji Asumsi Klasik yang terdiri atas Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov dan P-P Plot), Uji Multikolinearitas (Variance Inflation Factor/VIF dan Tolerance), serta Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser dan Scatterplot). Tidak terpenuhinya kaidah Asumsi Klasik akan mengakibatkan hasil regresi menjadi bias dan tidak valid (non-BLUE).

Strategi analisis utama untuk membuktikan hipotesis kausal-moderatif dilakukan menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). MRA merupakan metode regresi linier berganda yang di dalamnya disuntikkan variabel interaksi. Salah satu patologi statistik yang paling sering mengancam MRA adalah tingginya angka multikolinearitas struktural, di mana hasil perkalian variabel independen (X1) dan moderator (X2) niscaya akan berkorelasi sangat kuat dengan komponen asalnya. Untuk menetralkan patologi ini, penelitian ini menerapkan teknik Mean-Centering. Proses ini dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata tiap variabel independen, lalu mengurangi nilai asli setiap observasi dengan nilai rata-ratanya. Nilai yang telah tersentralisasi (X1_c dan X2_c) kemudian dikalikan untuk membentuk suku interaksi (X1_c * X2_c). Formula struktural MRA dalam kajian ini didefinisikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1(X1_c) + \beta_2(X2_c) + \beta_3(X1_c * X2_c) + \varepsilon$$

IV. HASIL/TEMUAN

Demografi dan Latar Belakang Responden

Analisis statistik deskriptif terhadap 61 responden dari 24 OPD di Kabupaten Enrekang menyingkap postur demografis yang esensial. Responden didominasi oleh kaum perempuan (67,2%) dan kelompok usia produktif awal (23-40 tahun sebesar 52,5%). Meninjau rekam jejak loyalitas, hampir separuh aparatur (47,5%) memiliki masa pengabdian melebihi 10 tahun, yang mensinyalkan tingginya kematangan organisasional. Namun demikian, anatomi latar belakang pendidikan menyajikan anomali struktural. Dari keseluruhan responden, yang mayoritas berijazah Strata Satu (S1), hanya 8,2% yang secara formal memiliki gelar linier di bidang akuntansi (S.Ak) atau ekonomi spesifik (S.E). Sebanyak 16,4% menyanggah gelar dari disiplin ilmu yang sepenuhnya divergen,

sementara 75,4% sisanya merupakan lulusan bidang umum. Kesenjangan spesialisasi akademik ini berimplikasi krusial terhadap kualitas asimilasi konseptual SAP dalam rutinitas pelaporan keuangan daerah.

Uji Kualitas Instrumen dan Asumsi Klasik

Seluruh item pengukuran yang diujikan secara statistik terbukti sahih. Uji validitas Pearson menjustifikasi bahwa nilai r -hitung untuk seluruh butir pernyataan X_1 , X_2 , dan Y melampaui r -tabel kritis (0,2521) dengan nilai $p < 0,05$. Konsistensi logis instrumen direplikasi dengan sangat baik melalui uji reliabilitas; nilai Cronbach's Alpha menembus ambang batas 0,70 dengan rincian: X_1 (0,940), X_2 (0,961), dan Y (0,869). Kelaikan model parametrik juga diamankan melalui terpenuhinya postulat asumsi klasik. Kolmogorov-Smirnov menahbiskan normalitas residual ($p = 0,200 > 0,05$). Implementasi mean-centering berhasil membasmi ancaman multikolinearitas struktural, di mana nilai Tolerance untuk seluruh prediktor ($X_1_c = 0,991$, $X_2_c = 0,984$) melebihi 0,10, dan VIF tertahan stabil di kisaran angka 1,01. Lebih lanjut, analisis Glejser mendeklarasikan absennya gejala heteroskedastisitas (seluruh probabilitas $> 0,05$).

Hasil Moderated Regression Analysis (MRA)

Hipotesis utama diestimasi menggunakan model MRA untuk membedah signifikansi efek utama (main effects) dan efek interaksi (moderation effect). Keluaran perangkat lunak statistik (Python/Statsmodels) menyarikan temuan pada tabel di bawah ini:

Table 1. Ringkasan Hasil Uji MRA (Mean-Centered)

Variabel / Komponen Model	Koefisien (β)	Std. Error	t-Hitung	Signifikansi (p)
Konstanta	48,999	0,620	79,079	0,000***
Penerapan SAP (X_1_c)	0,096	0,088	1,088	0,281
Pemanfaatan SAKD (X_2_c)	0,160	0,082	1,961	0,055*
Moderasi ($X_1_c * X_2_c$)	0,001	0,004	0,347	0,730
Uji F (F-statistic)	11,44	-	-	0,000***
Adjusted R-Square	0,343	-	-	-

Sumber: Hasil olah data primer (2026). *** signifikan 1%, * signifikan 10%.

Evaluasi simultan melalui Uji F melahirkan F-statistik sebesar 11,44 dengan probabilitas signifikansi yang sangat kuat sebesar $5,64e-06$ ($p = 0,000$). Tingkat signifikansi yang mendekati nol mutlak ini memastikan kelayakan empiris model (goodness of fit) dalam memprediksi varians Kualitas LKPD. Koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R-Square) bertengger di angka 0,343, menginterpretasikan bahwa konstruksi SAP, SAKD, dan interaksinya berkontribusi mendikte 34,3% perubahan kualitas laporan, sementara residu sebesar 65,7% dipicu oleh elemen eksogen. Persamaan regresi struktural dapat diformulasikan sebagai: $Y = 48,999 + 0,096(X_1_c) + 0,160(X_2_c) + 0,001(X_1_c * X_2_c) + \epsilon$.

V. PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Konstruksi analitis menyingkap bahwa Penerapan SAP memiliki lintasan koefisien yang positif, namun secara empiris tidak memenuhi kuorum signifikansi. Fakta ini membantah ekspektasi linier bahwa regulasi yang ketat akan secara mekanis membuahkan hasil yang akurat. Tidak berakarnya pengaruh SAP di lingkungan OPD Kabupaten Enrekang merupakan pantulan kausal dari defisit arsitektur SDM. Seperti yang diungkap dalam bedah demografi, tingkat partisipasi lulusan akuntansi murni di ruang mesin pengelola keuangan sangatlah minim (8,2%).

Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya transisi menuju basis akrual, bukan sekadar penyesuaian formulir administratif. Basis akrual adalah paradigma filosofis yang memaksa aparaturnya untuk menyelami pengakuan pendapatan saat hak timbul, depresiasi aset, dan kapitalisasi biaya, yang sepenuhnya bertumpu pada pertimbangan profesional (professional judgment). Tanpa kawah candradimuka pendidikan akuntansi yang linier, pedoman PSAP hanya bertransformasi menjadi dokumen normatif yang diisi melalui proses 'copy-paste' rutin tanpa pemahaman substansi. Oleh karena itu, ketidak-signifikanan SAP ini merupakan pengingat akademis bahwa efikasi sebuah pedoman (compliance theory) berbanding lurus dengan kapasitas intelektual agen yang mengimplementasikannya.

Pengaruh Pemanfaatan SAKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berbeda dengan pedoman teoretis, perangkat teknologis SAKD memanifestasikan utilitasnya melalui signifikansi statistik (meskipun pada taraf marginal). Hubungan positif yang solid ini memvalidasi teori otomasi birokrasi, di mana SAKD beroperasi sebagai alat peredam risiko (risk mitigator). Sistem yang ditanamkan (embedded system) memaksa disiplin prosedur: ketidakseimbangan debit dan kredit akan memblokir kelanjutan proses (error prevention). Selain itu, SAKD mengambil alih beban komputasi aritmatika dan konsolidasi data dari buku besar hingga menjadi Neraca dan LRA secara real-time. Minimalisasi intervensi mekanis manual inilah yang kemudian mencerahkan pilar keandalan dan ketepatan waktu dari sebuah laporan keuangan.

Peran Moderasi Pemanfaatan SAKD

Titik kulminasi dari pengujian ini bermuara pada penolakan empiris terhadap efek interaksi. Variabel perkalian ($X1_c * X2_c$) secara mencolok gagal menembus batas signifikansi. Kegagalan ini menyuntikkan narasi akademis yang kuat: SAKD murni memposisikan dirinya sebagai prediktor eksogen (independent predictor) yang menolak peran sebagai moderator. Temuan ini menelanjangi jebakan determinisme teknologi (technological determinism) yang kerap menjangkiti birokrasi, yang mengasumsikan bahwa perangkat lunak berbiaya mahal akan sanggup melipatgandakan (memoderasi) kualitas penerapan aturan, betapapun lemahnya pemahaman operator. Padahal, logika arsitektur SAKD bergantung mutlak pada input yang dimasukkan (garbage in, garbage out). Jika aparatur tidak memahami esensi SAP (misalnya, keliru mengklasifikasikan belanja modal sebagai belanja pemeliharaan), SAKD akan mengeksekusi kesalahan konseptual tersebut secara sempurna menjadi laporan yang secara matematis seimbang, namun secara substantif cacat (misleading).

Absennya efek moderasi membuktikan bahwa teknologi otomasi tidak memiliki kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk melakukan telaah kritis terhadap profesionalisme jurnal akuntansi. Otomasi sistem tidak dapat mengambil alih mandat analisis yang diwajibkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, eksistensi SAKD dan SAP berjalan dalam rel paralel yang independen. Ketimpangan di salah satu rel (kurangnya literasi SDM terhadap SAP) tidak dapat diselamatkan atau diangkat kualitasnya (dimoderasi) semata-mata oleh kecanggihan perangkat lunak SAKD. Keselarasan antara penguasaan substansi ilmu akuntansi (mindware) dan perangkat digital (software) adalah syarat mutlak, bukan opsi yang saling mensubstitusi.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjabaran empiris dan dialektika pembahasan, riset ini menyimpulkan bahwa secara parsial, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terbukti gagal mengartikulasikan pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebuah kenyataan yang bermuara pada defisit kompetensi akuntansi dari aparatur pengelola. Sebaliknya, Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) secara empiris berjasa meningkatkan kualitas pelaporan berkat eliminasi cacat klerikal melalui otomasi komputasional. Kesimpulan konklusif dari model moderasi menyatakan bahwa Pemanfaatan SAKD secara definitif tidak memoderasi (non-moderating) pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Instrumen digital tidak berdaya mereparasi ketidakpahaman mendasar aparatur atas postulat akuntansi akrual; sistem tersebut hanya berwujud sebagai prediktor yang mengendalikan alur administratif. Bertolak dari simpulan tersebut, direkomendasikan secara keras kepada Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk segera merancang restrukturisasi rekrutmen formasi analis keuangan yang mensyaratkan kualifikasi linear ilmu akuntansi murni. Pemutakhiran kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan sertifikasi terkait penerapan entri akrual tidak dapat lagi ditunda dan tidak dapat digantikan (disubstitusi) oleh sekadar pengadaan infrastruktur sistem (SAKD) versi terbaru. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengekspansi model struktural ini dengan memasukkan variabel kontrol seperti kultur integritas dan efikasi pengawasan (internal audit), agar peta determinasi kualitas pelaporan sektor publik menjadi semakin komprehensif.

REFERENSI

- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2016). The relationship between the use of performance measurement system, organizational factors, accountability, and the performance of public sector organizations. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 33(1), 1-22.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Erlangga.
- BPK RI. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2014-2019. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
- Colquitt, J. A., LePine, J. A., & Wesson, M. J. (2014). *Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace*. New York: McGraw-Hill Education.
- Erlina., & Rasdianto. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian.

- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2018). *Multivariate Data Analysis (8th ed.)*. United States: Cengage Learning.
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Keempat)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi (Edisi Keempat)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Putriasri, P. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rafid, R. (2016). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). *Accounting Information Systems (13th ed.)*. New Jersey: Pearson Education.
- Setiawan, A. (2013). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprihatin, N. S., & Ananthi, A. A. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(2), 154-168.
- Suwardjono. (2012). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: BPFE.
- Syawalina, C. F., & Rosmeiwati, T. (2019). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Audit Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 10(1), 22-35.
- Triwardana, D. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). *JOM Fekon*, 4(1), 112-126.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *E-journal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 1(1).